

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

AIPA sendiri sebelumnya bernama AIPO (ASEAN Inter-Parliamentary Organization), yang digagas pendiriannya oleh Indonesia pada tahun 1974.6 Gagasan berdirinya AIPO terwujud secara resmi melalui penandatanganan Statuta AIPO pada tanggal 2 September 1977 di Manila oleh para ketua delegasi dari parlemen-parlemen Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang menghadiri Konperensi ke-3 Antar-Parlemen ASEAN. Tujuan dari AIPO, sebagaimana disebutkan dalam Statuta, pada prinsipnya adalah untuk menggalang kerja sama dan hubungan antar-parlemen yang lebih erat, serta mencapai saling pengertian di antara parlemen-parlemen anggota AIPO dan memfasilitasi hasil-hasil dari tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN yang ditandatangani pada bulan Agustus 1967.

AIPA sendiri mempunyai struktur keanggotaan yang terdiri dari :

a.) Majelis Umum:

Majelis Umum merupakan badan pengambil keputusan yang mengadakan pertemuan tiap tahun. Setiap negara anggota mengirimkan 15 delegasi. Tiap delegasi dipimpin oleh Ketua DPR atau wakilnya, dan diantara delegasi itu, 5 orang diantaranya harus perempuan.

b.) Komite Eksekutif

Badan eksekutif di bawah arahan Majelis Umum. Keanggotaan Komite Eksekutif terdiri 3 anggota parlemen dari masing-masing Anggota Parlemen, salah satunya akan menjadi Speaker atau wakilnya.

c.) Komisi, Komite Studi dan Ad Hoc Committee

Komite Eksekutif akan dibahas secara rinci oleh Komite yang dibentuk oleh Majelis Umum. Komite Standing saat bersidang selama Majelis Umum adalah Komite Matters Politik, Komite Matters Ekonomi, Komite Matters Sosial, Komite Matters Organisasi, Komite Komunikasi Bersama, dan Komite Dialog dengan Observer Negara.

Dalam dekade terakhir, isu-isu kepentingan umum yang telah dibahas oleh Komite Studi AIPA dan Ad Hoc Komite adalah sebagai berikut:

- a.) Legislasi umum tentang Narkotika, Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Narkotika
- b.) Kelayakan Pembentukan Komite Legislatif ASEAN
- c.) Hak Asasi Manusiad.) Lingkungan dan Perlindungan Satwa Liare.) Sumber Daya Kelautan dan Pesisirf.) Peningkatan Sekretariat Tetap AIPAg.) Hukum ASEAN Terkait atau Memiliki Dampak Pelaksanaan AFTA (ASEAN Free Trade Area)h.) Hukum ASEAN Terkait Pengembangan Pariwisata dan Sumber Daya Manusiai.) Peran Badan Legislatif ASEAN dalam Menghadapi Krisis Ekonomi dan Keuangan Daerahj.) Kerjasama ASEAN Kesehatan Masyarakat

d. Woman Parliament of AIPA (Waipa)

Woman Parliament of AIPA (Waipa) didirikan pada tahun 1998 sebagai cabang dari AIPA. Pertemuan Waipa diadakan di tahunan Majelis Umum AIPA dan yang diketuai oleh salah satu wanita anggota parlemen dari negara tuan rumah. Maksud dan tujuan dari Waipa adalah:

1. Untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam AIPA dengan berusaha untuk membawa peningkatan jumlah perempuan delegasi ke acara AIPA

2. Untuk lebih meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen di seluruh ASEAN

f. Untuk memastikan bahwa hal-hal yang menjadi perhatian khusus untuk perempuan diletakkan dalam agenda Majelis Umum AIPA

g. Mengusulkan topik untuk Komite Studi AIPA dan mengorganisir konferensi untuk tujuan tersebut

h. Untuk bertemu setiap tahun pada saat Sidang Umum AIPA ini

i. Untuk memfasilitasi jaringan antara perempuan anggota parlemen ASEAN

j. Untuk membangun jaringan dengan asosiasi perempuan lain dan pertemuan perempuan dalam organisasi-organisasi internasional seperti Asosiasi Parlemen Persemakmuran dan Uni Inter-Parliamentary.

k. Permanen Sekretariat

Terletak di Jakarta, Sekretariat Tetap AIPA didirikan pada tahun 1990 oleh Majelis Umum ke-11 sebagaimana diizinkan oleh Pasal 7 Statuta AIPA.

Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen dinegara-negara ASEAN dan organisasi ini juga mempunyai misi khusus untuk mendukung program kerja dan cita-cita ASEAN visi 2020 yang meliputi ASEAN Community 2015.

Sedangkan *ASEAN Community* sendiri didirikan sebagai wadah untuk melakukan kerjasama baik dalam bidang politik, keamanan, dan ekonomi khususnya kerjasama dalam perdagangan dan promosi pariwisata. Pertama kali *ASEAN Community* dibentuk ialah pada tahun 2003 melalui *ASEAN Summit* dengan target pada awalnya diselenggarakan pada tahun 2020.

Ide gagasan *ASEAN Community* pertama kali muncul dimulai pada tahun 2003 saat KTT ASEAN berlangsung. Atas kinerja ASEAN yang dinilai membanggakan dan campur tangan ASEAN dalam upaya rekonsiliasi bencana alam di beberapa daerah serta kerjasama yang dianggap menguntungkan. Akhirnya ASEAN membentuk kerjasama lanjutan yaitu *ASEAN Community* yang meliputi 3 pilar:

Pilar yang pertama *ASEAN ASEAN Political-Security Community*, dibentuk untuk menciptakan stabilitas keamanan regional dimana juga disinggung mengenai politik yang tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keamanan di sebuah negara. Kerjasama di kedua aspek tersebut untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan. Dan dengan adanya pembentukan ini, negara-negara di kawasan diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang persuasive.

ASEAN Economic Community pembentukan ini didasarkan karena adanya keinginan untuk mengintegrasikan perekonomian antar anggota negara di Asia Tenggara. Dengan begitu, diharapkan perluasan kerjasama dalam ekonomi tersebut akan menciptakan hasil yang positif untuk keberlangsungan hubungan di setiap negara anggota.

Pilar yang ketiga *ASEAN Socio-Culture Community* yang dibentuk dengan tujuan mengembalikan kesadaran masyarakat ASEAN untuk memelihara rasa kesatuan dan solidaritas di antara sesama. Komunitas ini difokuskan pada pemeliharaan manusia, budaya, dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan di ASEAN dalam situasi yang harmonis.

Upaya-upaya AIPA dalam pencapaian ASEAN Community 2015 disetiap negara anggota ASEAN yang menjadi penghambat dengan cara:

1. Mengharmonisasi produk legislasi politik dengan cara AIPA membuat laporan, program dari setiap delegasi mengenai masalah-masalah dan inisiatif kebijakan seperti :
Seperti contoh kasus demokratisasi di Myanmar.
2. Mengharmonisasi produk legislasi politik dengan cara AIPA membuat laporan, program dari setiap delegasi mengenai masalah-masalah dan inisiatif kebijakan :
Seperti kasus masalah ketahanan pangan

3. Melakukan kegiatan kegiatan guna Mengharmonisasi produk legislasi politik dengan cara AIPA membuat laporan, program dari setiap delegasi mengenai masalah-masalah dan inisiatif kebijakan seperti :
Seperti kasus masalah penanggulangan bencana